TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM MENGATASI AKSI TERORISME

Reza Alfiansyah M. Pampawa, Sujono, Bambang Widarto
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Abstract

The threat of terrorism to the security of the Republic of Indonesia requires handling by various responsible parties to safeguard the defense and security of the nation. Therefore, the role of the Indonesian National Army (Tentara Nasional Indonesia) in combating terrorist crimes is highly strategic. It is interesting and important to further examine how the Indonesian National Army is regulated in the fight against terrorism. Additionally, what challenges does the Indonesian National Army face in combating terrorist crimes? To address these issues, a normative legal research method with an approach to legislation and conceptual analysis is employed. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources are collected and analyzed using qualitative data analysis techniques. The research findings indicate that the regulation of the Indonesian National Army's role in combating terrorist crimes, explicitly aimed at maintaining the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia, is established in several legislative regulations. These include the Law No. 3 of 2002 on State Defense, Law No. 34 of 2004 on the Indonesian National Army, and Law No. 5 of 2018 amending Law No. 15 of 2003 concerning the Determination of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2002 on Combating Terrorism Becoming Law. However, the challenges related to the Indonesian National Army's involvement in combating terrorist crimes still depend on state policy and political decisions, and the implementation mechanism for the Indonesian National Army's tasks in combating terrorist crimes awaits the issuance of a Presidential Regulation as an implementing regulation for Law No. 5 of 2018.

Keywords: Law No. 15 of 2003, Criminal acts of terrorism

Abstrak

Ancaman terorisme terhadap keamanan Negara Republik Indonesia membutuhkan penanganan dari berbagai pihak yang bertanggung jawab guna menjaga pertahanan dan keamanan negara. Oleh sebab itu, peranan Tentara Nasional Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi sangat strategis. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme? Dan bagaimana kendala Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pengaturan peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti diatur didalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dan kendala keterlibatan peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme masih bergantung pada kebijakan dan keputusan politik negara dan mekanisme pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 5 Tahun 2018.

Katakunci: UU No. 15 Tahun 2003, Tindak Pidana Terorisme

PENDAHULUAN

Perkembangan terorisme meningkat secara signifikan sejak diawal tahun 1970-an. Dalam periode itu, terorisme berkembang mengusung melalui agama tertentu, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan teror dilakukan demi menegakkan dan melanggengkan kekuasaannya. Ketidakstabilan dunia dan munculnya frustrasi sekelompok masyarakat di berbagai negara menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, sehingga memicu meluasnya

terorisme. Kegiatan terorisme dalam berbagai bentuk, terus berkembang dan semakin meluas keberbagai negara seperti yang terjadi pada serangan bom di World Trade Centre (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001, yang berlanjut pada terjadinya serangkaian aksi teror seperti yang terjadi di Indonesia yakni Bom Bali I (2002), Bom Bali II (2005), peledakan Hotel Marriot Jakarta dan di depan Kedutaan Besar Australia, Kuningan Jakarta hingga peledakan bom seperti di Rusia, Mesir, Spanyol, Inggris, bahkan bom bunuh diri Irak pasca pendudukan negara koalisi global.

Terorisme harus diakui sebagai suatu permasalahan global dan menjadi bentuk baru perang dan merupakan ancaman yang sewaktu-waktu terjadi dan menjadi ancaman nyata bagi dunia. Apabila dilihat dari trend perkembangan saat ini dan yang akan datang menunjukkan bahwa kegiatan terorisme semakin meningkat baik dalam kualitas maupun kuantitas yang dapat berpotensi mengganggu stabilitas keamanan ditingkat internasional, regional maupun nasional. Sebagai salah satu ancaman yang dapat membahayakan situasi keamanan suatu negara, terorisme saat ini sudah menjadi ancaman global dengan jaringan yang bersifat internasional.

Untuk mengantisipasi atau memperkirakan ancaman terorisme tersebut, pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua pada Pasal 30 ayat (2) menyebutkan, “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Artinya, di konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan membentuk 2 (dua) Lembaga negara yang bertugas melakukan pertahanan dan keamanan negara Indonesia, yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Dan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua telah membedakan fungsi dan tugas kedua lembaga/institusi tersebut.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, pada Pasal 43I telah diatur tentang peran Tentara Nasional Indonesia, adalah:

- Ayat (1): Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
- Ayat (2): Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.

Di samping itu, peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme ini juga telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan:

- Ayat (1): Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- Ayat (2): Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Operasi militer untuk perang;
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-undang;
 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- Ayat (3): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, maka tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah melaksanakan operasi militer selain perang. Dan di dalam ketentuan tersebut juga disebutkan salah satu dari operasi militer selain perang adalah pemberantasan terorisme yang harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara. Artinya, dengan adanya ketentuan tersebut, maka menjadi landasan hukum Tentara Nasional Indonesia dalam bentuk operasi penindakan terorisme.

Peranan Tentara Nasional Indonesia dalam memberantas terorisme di Indonesia sudah pernah terjadi dalam beberapa peristiwa sebelumnya. Contohnya, peristiwa pembebasan sandera di Pesawat Garuda Indonesia yang dibajak pada tanggal 28 Maret 1981. Pesawat rute Jakarta – Medan yang dikenal dengan sebutan “Woyla” itu dikuasai kelompok yang menamakan dirinya Komando Jihad. Kemudian pada tanggal 31 Maret 1981, pasukan Grup 1 Para Komando dari Komando Pasukan Sandi Yudha (Koppasandha, sekarang bernama Kopassus) yang dipimpin Letkol Infanteri Sintong Panjaitan melakukan operasi pembebasan di Bandara Mueang, Bangkok, Thailand. Contoh lainnya, adalah peristiwa pembebasan Kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perompok Somalia pada Maret 2011 lalu. Aksi pembebasan serentak terhadap sandera dilakukan

dengan mengerahkan pasukan yang terdiri dari 1 LPD, 1 helikopter, dan penambahan pasukan khusus dari Marinir, Kopassus, Kostrad, serta melibatkan Sandi Yudha.

Begitu pula dalam operasi Tinombala (operation Tinombala) adalah operasi yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2016 di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dalam operasi ini melibatkan Satuan Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus. Operasi Tinombala berhasil membatasi ruang gerak kelompok Santoso dan membuat mereka berada dalam kondisi terjepit dan kelaparan. Pada tanggal 18 Juli 2016, Santoso alias Abu Wardah tewas ditembak oleh Satuan Tugas Operasi Tinombala setelah terjadinya baku tembak di wilayah desa Tambarana. Operasi Tinombala ini bertujuan untuk menangkap kelompok teroris Santoso. 150 prajurit untuk bergabung bersama Satuan Tugas Operasi Tinombala dalam memburu sisa-sisa militan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) kelompok yang telah berbaiat kepada Negara Islam (ISIS) di Poso, Sulawesi Tengah.

Demikian pula, bila kita lihat pada tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah membuka ruang bagi negara-negara untuk menggunakan kekuatan militer dalam melawan terorisme. Misalnya, dengan memberikan otoritas penyerangan ke Afganistan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, paradigma tindak pidana terorisme yang ada saat ini telah menuju ancaman terhadap kedaulatan negara dan bersifat transnasional.

Realitasnya, cakupan dari ancaman terorisme tidak hanya terbatas pada ancaman keamanan saja, tetapi juga dapat dianggap sebagai ancaman terhadap pertahanan nasional karena yang disasar dalam setiap aksi teror adalah sistem dalam negara melalui aksi yang menakutkan. Di hampir semua negara dan Kawasan, tidak ada ancaman keamanan internal yang terisolasi dari perkembangan internasional sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, sistem keuangan internasional, dan pertukaran atau arus manusia yang terbuka. Dampak yang ditimbulkan terkait dengan pemberantasan terorisme tidak bisa lagi dibatasi hanya dalam suatu negara. Hal tersebut memaksa negara harus melakukan upaya nasional dan internasional dalam pemberantasan terorisme. Perluasan cakupan dari ancaman terorisme yang semula dianggap sebagai ancaman keamanan menjadi ancaman terhadap pertahanan negara memerlukan perubahan paradigma dalam upaya pemberantasan terorisme. Oleh karena itu diperlukannya untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia dalam upaya penanganan terorisme di Indonesia. Bahwa ancaman terorisme terhadap keamanan Negara Republik Indonesia membutuhkan penanganan dari berbagai pihak yang bertanggung jawab menjaga pertahanan dan keamanan negara. Oleh sebab itu, peranan Tentara Nasional Indonesia dalam upaya penanganan terorisme menjadi sangat strategis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual,. Berdasarkan jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan factor yang

sangat penting, karena sumber data yang menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research) untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan,

Sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme

Sebagai kapasitas dalam upaya keamanan negara, negara harus memiliki fleksibilitas dalam merumuskan aturan, menentukan strategi, dan mempekerjakan kekuatan dalam kontra terorisme. Kebijakan atau keputusan yang sah dapat menggunakan cara yang koersif dan non-koersif. Ini juga merupakan suatu pesan bahwasanya keamanan negara terutama dalam menghadapi terorisme tidak dapat diklaim sebagai monopoli kekuasaan institusional. Ancaman terorisme menimbulkan ancaman keamanan, dan langkah-langkah untuk memerangi ancaman itu harus ditangani dalam kebijakan terbuka dan opsi keputusan. Ini karena karakter dari ancaman terorisme fakta bahwa itu multi-dimensi dan multi-sektoral.

Jika negara menganggap bahwa terorisme sebagai ancaman bagi negara dan ketertiban umum, maka tindakan militer dapat digunakan melalui dasar kebijakan dan keputusan Presiden yang dibuat melalui beberapa tahapan. Dalam hal ini kekuatan militer dapat dan bahkan harus dimasukkan ke dalam langkah-langkah kontra terorisme, kemampuan, legal, maupun politis. Secara teknis, kemampuan militer meliputi peringatan dini, pencegahan dini, tindakan keras, dan keamanan, serta rehabilitasi posisi suatu wilayah atau masyarakat sebagai akibat dari serangan teroris. Dari sudut pandang hukum domestik serta hukum internasional, militer dapat digunakan untuk menghadapi terorisme.

Peranan Tentara Nasional Indonesia dalam memberantas terorisme di Indonesia sudah pernah terjadi dalam beberapa peristiwa sebelumnya. Contohnya, peristiwa pembebasan sandera di Pesawat Garuda Indonesia yang dibajak pada tanggal 28 Maret 1981. Pesawat rute Jakarta – Medan yang dikenal dengan sebutan “Woyla” itu dikuasai kelompok yang menamakan dirinya Komando Jihad. Kemudian pada tanggal 31 Maret 1981, pasukan Grup 1 Para Komando dari Komando Pasukan Sandi Yudha (Koppasandha, sekarang bernama Kopassus) yang dipimpin Letkol Infanteri Sintong Panjaitan melakukan operasi pembebasan di Bandara Mueang, Bangkok, Thailand. Contoh lainnya, adalah peristiwa pembebasan Kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perompok Somalia pada Maret 2011 lalu. Aksi pembebasan serentak terhadap sandera dilakukan dengan mengerahkan pasukan yang terdiri dari 1 LPD, 1 helikopter, dan penambahan pasukan khusus dari Marinir, Kopassus, Kostrad, serta melibatkan Sandi Yudha.

Begitu pula dalam operasi Tinombala (operation Tinombala) adalah operasi yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2016 di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dalam operasi ini melibatkan Satuan Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus. Operasi Tinombala berhasil membatasi ruang gerak kelompok Santoso dan membuat mereka berada dalam kondisi terjepit dan kelaparan. Pada tanggal 18 Juli 2016, Santoso alias Abu Wardah tewas ditembak oleh Satuan Tugas Operasi Tinombala setelah terjadinya baku tembak di wilayah desa Tambarana. Operasi Tinombala ini bertujuan untuk menangkap kelompok teroris Santoso. 150 prajurit untuk bergabung bersama Satuan Tugas Operasi Tinombala dalam memburu sisa-sisa militan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) kelompok yang telah berbaiat kepada Negara Islam (ISIS) di Poso, Sulawesi Tengah.

Secara umum negara melibatkan militer dalam penanggulangan terorisme dalam 2 (dua) kerangka yaitu, militerisasi penuh penanggulangan terorisme dan perbantuan terhadap otoritas penegak hukum atau yang lebih dikenal dengan *military aid to the civil authority (MACA)*. Keterlibatan militer dalam penanggulangan terorisme didasarkan pada alasan operasional; daya hancur (*firepower*) dan mobilitas taktikal yang dimiliki oleh militer sangat dibutuhkan dalam penanggulangan terorisme terutama yang melibatkan penguasaan wilayah dan penggunaan kekuatan militer secara terorganisir. Kualifikasi lain seperti penjinakan bahan peledak, penyelamatan sandera dan pengumpulan intelijen juga sangat krusial.

Sementara itu dalam hal politik, penggunaan kekuatan militer dalam memberantas terorisme adalah kebijakan dan keputusan presiden berdasarkan evaluasi tingkat ancaman. Bahkan di negara dengan proses dan tradisi demokrasi yang mapan, pengerahan kekuatan militer untuk memerangi aksi terorisme tidak jarang terjadi dalam hubungan antar-nasional.

Perdebatan dan resistensi sejumlah pihak terhadap wacana keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme harus dipahami dalam konteks demokratisasi dan reformasi sektor keamanan yang masih berlangsung di Indonesia. Sebagai bagian dari agenda reformasi politik yang dimulai sejak akhir 1990-an, reformasi sektor keamanan pada dasarnya berusaha melakukan transformasi struktur, legislasi dan budaya dari institusi-institusi keamanan termasuk militer dan kepolisian. Secara garis besar, reformasi sektor keamanan berupaya membangun institusi keamanan yang tangguh, modern dan profesional sehingga mampu

menjawab tantangan dan ancaman keamanan kontemporer dalam kerangka tata pemerintahan yang demokratis. Terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan aktif Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme dapat mengganggu upaya pewujudan agenda-agenda reformasi sektor keamanan, terutama mengalihkan fokus dari pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan yang tangguh dan profesional untuk menghadapi ancaman militer konvensional.

Dalam perkembangannya reformasi sektor keamanan tergiring pada dikotomi pertahanan keamanan dimana masalah pertahanan (terhadap ancaman militer, terutama dari luar negeri) menjadi wilayah kerja militer sedangkan keamanan (dalam negeri) menjadi wilayah kepolisian. Upaya penanggulangan terorisme yang mulai gencar pasca rangkaian serangan bom pada awal tahun 2000-an, dimana Tentara Nasional Indonesia masih membiasakan dirinya di struktur pemerintahan yang demokratis pasca reformasi, tidak memberikan banyak ruang bagi keterlibatan Tentara Nasional Indonesia. Upaya penanggulangan terorisme di Indonesia yang dengan demikian, harus memanfaatkan secara efektif sebisa dan seefektif mungkin menggunakan infrastruktur kelembagaan yang sudah ada seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Tentara Nasional Indonesia tanpa harus membentuk lembaga baru. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah pengaturan kelembagaan untuk memperjelas peran Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme serta perlunya mengatur mekanisme koordinasi dan keterlibatan lembaga-lembaga ini.

Secara definisi, separatisme berarti deklarasi perlawanan terhadap kedaulatan negara dan segala bentuk aturan hukum yang berlaku. Selain atas dasar motif politiknya, separatisme yang melibatkan perlawanan bersenjata secara terorganisir dan penguasaan wilayah membutuhkan spesialisasi yang dimiliki oleh militer yang terlatih menghadapi bentuk “perang” konvensional, baik simetris maupun asimetris. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan prosedur untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme sebagai bagian dari insurgensi.

Aksi terorisme merupakan tindak pidana yang telah meresahkan masyarakat dunia, tidak luput juga di Indonesia. Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan lintas negara (transnasional crimes), terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana yang jaringannya sangat luas serta bisa mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Tindak pidana terorisme ini juga merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tentunya dalam pemberantasannya dilakukan secara luar biasa pula.

Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme ini sangatlah besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme ini. Di Indonesia sendiri sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana terorisme. Peraturan perundang-undangan tersebut ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang serta pembaharuan dari Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Artinya, penanggulangan terorisme di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Di dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut menentukan beberapa lembaga yang terlibat dan berwenang dalam mengatasi aksi terorisme, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Terhadap kajian mengenai kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi terorisme diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentu didasari pengaturan di dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum, kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa:

- Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
- Ayat (2): “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.
- Ayat (3): “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.
- Ayat (4): “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.
- Ayat (5): “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang”.

Substansi ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui

sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Hal ini berarti bahwa dalam usaha membangun konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu kesatuan kekuatan utama negara yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, rakyat merupakan kekuatan pendukung Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Analisa aspek legitimasi kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi terorisme dapat dimulai dari dasar hukum yang mengatur kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi terorisme. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan dasar hukum (legitimasi) bagi Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, menyatakan bahwa tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kewenangan Tentara Nasional Indonesia secara signifikan tertera didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 7 sebagai tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi:

- Ayat (1): “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
- Ayat (2): “Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk peran;
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;

10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang di atur dalam Undang-Undang;
 11. Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan”.
- Ayat (3): “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dikatakan bahwa tugas pokok Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 telah bersesuaian dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Tugas Tentara Nasional Indonesia, baik itu tugas pokok yang dilakukan dengan operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang adalah sebagai usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia jo. Pasal 43I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka kewenangan tersebut merupakan pelaksanaan dari konsep pertahanan negara dari ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Pengaturan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 secara hirarkie perundang-undangan telah bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (konstitusi). Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, baik itu dalam bentuk operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang merupakan upaya mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan bangsa dari segala macam bentuk ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara, keutuhan bangsa dan negara, baik itu

yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, termasuk terorisme sebagai potensi ancaman keamanan negara.

Wewenang Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme yang diatur dalam berbagai Undang-undang merupakan suatu keniscayaan dari pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mewujudkan pertahanan negara dari segala bentuk ancaman yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ideologi, politik, dan budaya bangsa. kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme sebagai potensi ancaman keamanan negara merupakan suatu keharusan yang dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam konstitusi dan Undang-undang.

B. Kendala Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terrorisme

Meskipun sudah ada dasar pengaturan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, namun sampai saat ini belum terlaksana secara optimal termasuk dalam mengimplementasikan tugas pokok, peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Mengenai kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme telah diatur dalam Pasal 43I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 43I secara substansial menyebutkan:

- Ayat (1): “Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang”.
- Ayat (2): “Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
- Ayat (3): “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”.

Ketentuan Pasal 43 huruf I tersebut di atas, dipahami bahwa kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi terorisme disesuaikan dengan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hal ini berarti, bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi terorisme akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Terorisme yang harus sesuai dengan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia yang diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Dengan kata lain, pelaksanaan kewenangan Tentara Nasional Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004.

Substansi Pasal 43 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, apabila dicermati secara seksama, dapat dikatakan bahwa pasal tersebut hanya mereduksi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Hal ini berarti bawah keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme masih bergantung pada kebijakan dan keputusan politik negara dan mekanisme pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Terorisme. Dengan demikian, peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tetap bergantung pada kebijakan dan keputusan politik negara.

2. Struktur Hukum

Penanganan terorisme di Indonesia melibatkan beberapa lembaga atau institusi yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda satu sama lain, namun tetap berada pada garis koordinasi hubungan kerjasama dalam rangka penanggulangan terorisme. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 menentukan beberapa lembaga yang terlibat dan berwenang dalam mengatasi aksi terorisme, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Beberapa lembaga yang terlibat dalam penanganan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 terlihat adanya penguatan peran dan fungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam penanganan aksi terorisme. Dengan diaturnya, peran dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam penanganan aksi terorisme dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, maka Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan penanganan aksi terorisme di Indonesia.

Sementara itu, kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme berada di luar koordinasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 43G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 yang menyebutkan: “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas:

- a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme dibidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;
- b. mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme;
- c. mengoordinasikan program pemulihan korban; dan
- d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme dibidang kerjasama internasional”.

Merujuk pada ketentuan Pasal 43G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 khususnya pada huruf a dan huruf b, maka pengertian “aparatus penegak hukum”, Tentara Nasional Indonesia tidaklah termasuk di bawah garis koordinasi dari pelaksanaan tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sebab, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dengan demikian, peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme belum memiliki kepastian hukum, karena belum ada aturan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Selain itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, merumuskan: “Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka penanganan aksi terorisme berada pada koridor penegakan hukum (law enforcement) melalui pendekatan hukum pidana.

Wewenang penegakan hukum merupakan ranah atau kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai penyidik, sedangkan pada tingkat penuntutan menjadi merupakan wewenang dari Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum, dan penjatuhan putusan menjadi wewenang yang dimiliki oleh Hakim. Adapun pelaksanaan putusan hakim dilakukan oleh Kejaksaan, yang kemudian dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain, penanganan aksi terorisme merupakan bagian dari penegakan hukum yang menuntut bekerjanya sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Belum adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka pemerintah harus segera merampungkan draf dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Terorisme, sehingga pelaksanaan wewenang masing-masing lembaga/institusi yang terlibat mengatasi aksi terorisme dapat dilaksanakan secara bersinergi dalam garis koordinasi yang harmonis dan baik. Dengan demikian, diharapkan penanganan aksi terorisme dapat terlaksana secara maksimal, dengan tetap berada pada koridor penegakan hukum (law enforcement) dan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

3. Budaya Hukum

Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, budaya hukum organisasi Tentara Nasional Indonesia masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Meskipun kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, yang kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, namun dilihat dari aspek budaya organisasi Tentara Nasional Indonesia, masih menghadapi berbagai kendala. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang di bidang pertahanan yang berfungsi sebagai

penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan sebagai penindak terhadap setiap bentuk ancaman serta memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Penanganan aksi terorisme, meskipun termasuk dalam kategori tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), namun dalam praktiknya masih sulit dilaksanakan karena belum adanya peraturan pelaksana yang menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Oleh sebab itu, ketika Tentara Nasional Indonesia mengacu pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu pada Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai mekanisme perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Insitusi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengartikan tugas Tentara Nasional Indonesia hanya sebatas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Jika dicermati, kedua Undang-undang tersebut memiliki amanat aturan pelaksanaan yang berbeda. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengamanatkan aturan pelaksanaannya dalam bentuk Undang-undang, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan perbantuan Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa masih adanya perbedaan persepsi dalam pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya berkaitan dengan Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia mengatasi aksi terorisme yang termasuk dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang. Selanjutnya, permasalahan budaya organisasi juga muncul ketika adanya perbedaan penafsiran mengenai konsep keamanan negara (nasional) yang menjadi tugas seluruh komponen bangsa termasuk Tentara Nasional Indonesia, dengan keamanan ketertiban masyarakat yang menjadi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diartikan sebagai keamanan secara keseluruhan, sehingga seluruh keamanan menjadi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pertahanan menjadi tugas Tentara Nasional Indonesia.

SIMPULAN

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

2. Adapun kendala keterlibatan peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme masih bergantung pada kebijakan dan keputusan politik negara dan mekanisme pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tetap bergantung pada kebijakan dan keputusan politik negara.

SARAN

1. Agar peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, maka perumusan peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme perlu adanya konformitas dari berbagai kepentingan, sehingga dapat ditemukan format keseimbangan yang ideal terkait dengan pelaksanaan peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang sesuai dengan amanat konsitusi, Undang-undang dan aspirasi masyarakat sipil yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Tolok ukur prinsip keseimbangan (proporsionalitas) dalam perumusan kebijakan hukum pengaturan peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dapat mengacu pada konsep keadilan distributif yang didasari pada prestasi Tentara Nasional Indonesia, kebutuhan nasional dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan menjaga pertahanan negara yang didalamnya juga berfungsi untuk menjaga keamanan negara.
2. Perlu untuk merekonstruksi kembali ketentuan Pasal 1 dan Pasal 43 huruf I ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, dimana rumusan mengenai terorisme tidaklah sebagai bentuk tindak pidana, melainkan merupakan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- Arif, Muhammad. *Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme*, Jakarta: Indonesia Civil Society Against Violent Extremism, 2018.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Edisi Cet. 2, Malang: Setara Press, 2016.
- Bryan A. Gardner, *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, London, 1999.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. 7, Jakarta: Rajawali Perss, 2013.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah dan Sigid Suseno, *Tindak Pidana Khusus*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- A. Gardner, Bryan. *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, London, 1999.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hardiman, F. Budi. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2003.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet. 3, Jakarta: Stora Grafika, 2018.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Manulang, A.C. *Terorisme dan Perang Intelejen*, Jakarta: Mannazaitun, 2006.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *OMP (Bujukin Operasi Militer Untuk Perang dan OMSP (Bujukin Operasi Militer Selain Perang)*, Jakarta: Babinkum TNI, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.
- Mohamad, Simela Victor. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002.
- Muladi. *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Perss, 2009.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.

- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudarto. *Hukum Pidana IA – IB*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990.
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syafaat, Muchamad Ali. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2003.
- Wahid, Abdul. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Wiradipradja, Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cet. 2, Bandung: Keni Media, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

----- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

----- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

----- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

----- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

----- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199

JURNAL

Atno dan Nanda Julian Utama, "Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947", *Journal of Indonesian History*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 12-18.

Syukria, Elia Aninda. “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (KOOPSUSGAB TNI)”, *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 3, hlm. 70.

Wulansari, Eka Martiana. “Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme”, di *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu*, (Pascasarjana Universitas Pamulang, 2017): hlm. 225.

INTERNET

Andirizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”, terdapat dari situs <https://media.neliti.com/media/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2023, Pukul 20.15 Wib.,

Keisyah Aprilia, “TNI Kirim 150 Pasukan Untuk Buru Kelompok MIT di Poso”, terdapat di situs <https://www.benarnews.org/indonesian/.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2023, Pukul 15.16 Wib.

wikipedia.org, “Definitian of Terrorism”, terdapat di situs <http://en.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2023, Pukul 11.15 Wib.